



*Dugaan Korupsi Pavingisasi Jalan Gajah Mada  
Kualitas Lebih Bagus, Volume  
Pengerjaan Diduga Dikurangi*

Denpasar (Bali Post)

Sidang lanjutan dugaan korupsi pavingisasi Jalan Gajah Mada, Selasa (6/10) kemarin mulai dilakukan pemeriksaan terdakwa sekaligus saksi mahkota. Terdakwa Alit Widhiadnyana A.S. dan Ngurah Kosala Cakrawerthi saling bersaksi dan juga diperiksa sebagai terdakwa. Dalam sidang yang dipimpin Acmad Peten Sili itu, mengemuka masalah kualitas paving yang dipasang lebih bagus dari perjanjian atau kontrak. Namun di sisi lain, ada dugaan pengurangan volume pengerjaan proyek.

Seperti disampaikan Alit, Direktur PT Alit Wirajaya, kualitas paving yang dipasang lebih bagus dari yang ada di kontrak kerja. Atas jawaban itu, hakim sedikit heran dan kemudian melayangkan sejumlah pertanyaan. "Apa benar paving yang Anda pasang ini lebih bagus dari yang ada di kontrak," tanya hakim.

Alit membenarkan paving yang dipasang memang lebih baik dari yang ada di kontrak. Hal ini dilakukan karena dari hasil tes, ternyata paving yang sesuai dengan kontrak kualitasnya di bawah paving yang saat ini terpasang. Menurutnya, paving yang sekarang terpasang mutu dan daya tahannya lebih bagus dari yang sebelumnya di kontrak.

Selain itu, terdakwa juga sempat ditanya soal metode perhitungan yang dilakukan tim ahli dari Universitas Udayana (Unud) dan Polresta Denpasar, hingga ditemukan kekurangan volume dalam pengerjaan pavingisasi di Jalan Gajah Mada. Namun, Alit mengaku tidak tahu metode yang digunakan oleh Unud. Saat dilakukan serah terima pada akhir 2012, proyek ini sudah selesai 100 persen. Namun dalam perhitungan Unud, ditemukan kekurangan volume pengerjaan hingga mengakibatkan kerugian negara Rp 210 juta. Alit mengaku, dalam perhitungan ulang yang dilakukan memang ada kekurangan volume 200 m<sup>2</sup> dari total pengerjaan 5.000 m<sup>2</sup>. Hanya, dia mengaku tidak tahu mengapa bisa ada kekurangan tersebut.

Sementara terdakwa Ngurah Kosala sebagai konsultan pengawas menyatakan dalam pekerjaannya ia selalu dibantu pengawas lapangan. Direktur CV Unika Design ini mengaku sempat beberapa kali mengecek proyek dan membandingkan dengan hasil laporan pengawas lapangan. Meski mengaku sempat mendampingi Unud saat melakukan perhitungan, namun ia tidak tahu metode apa yang digunakan. Namun yang diketahuinya, tim Unud dan polisi sempat membongkar paving di beberapa titik untuk diuji. (kmb37)

Edisi : Rabu, 7 Oktober 2015

Hal : 2





Pemkab Telusuri Kasus SPPD Fiktif

# Dua Pemalsu Tanda Tangan Bupati Turun Jabatan

**Gianyar (Bali Post) -**

Puluhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dispenda Gianyar yang terseret sebagai tersangka dalam kasus SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) fiktif, menimbulkan geger di Pemerintah Kabupaten Gianyar. Kini, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Bagian Hukum Pemkab Gianyar pun sudah dikerahkan untuk ikut menelusuri kasus ini. Sementara untuk dua tersangka pemalsuan tanda tangan Bupati A.A. Gde Agung Bharata, sudah dipastikan mendapat sanksi dengan penurunan jabatan

menjadi staf biasa di BKD Gianyar.

Sekda Gianyar I.B. Gaga Adi Saputra yang dihubungi Selasa (6/10) kemarin, mengaku belum mengetahui secara detail kasus SPPD fiktif yang menjerat puluhan tersangka di Dispenda Gianyar tersebut. Meski demikian, pihaknya sudah menugaskan BKD dan Bagian Hukum untuk menelusuri secara detail kasus ini. "Saya sudah menugaskan BKD dan Bagian Hukum untuk melakukan penelusuran atas kasus tersebut, sehingga diketahui secara jelas dan detail," katanya.

ujar Gus Gaga.

Sementara untuk dua PNS yang terjerat kasus pemalsuan tanda tangan Bupati terkait pengelolaan aset Metro Pemprov Bali, Gus Gaga menegaskan bahwa kedua tersangka yakni Ida Bagus Nyoman Sukadana (52) dan I Nyoman Pasek Sumertana (51) sudah mendapat penindakan dari Inspektorat berupa sanksi penurunan jabatan. "Khusus untuk dua PNS yang terlibat kasus pemalsuan, kami sudah memberikan sanksi dengan menurunkan jabatannya. Keduanya kini hanya sebagai staf biasa di BKD," katanya.

Karena pihaknya belum mengetahui secara jelas kasus tersebut, Pemkab Gianyar belum berani memastikan pemberian bantuan hukum terhadap para tersangka. "Saat ini masih dilakukan koordinasi, apakah bisa diberikan bantuan hukum atau tidak. Jika semuanya nanti sudah jelas, barulah kami akan bertindak," jelasnya.

Orang nomor tiga di jajaran Pemkab Gianyar ini mengaku sedih dan kaget dengan adanya kasus tersebut. "Yang jelas saya sangat prihatin, sedih dan tentu saja kaget atas berita tersebut,"

Diberitakan sebelumnya, Kejari Gianyar

Tengah menangani perkembangan kasus pemalsuan tanda tangan Bupati Gianyar A.A. Gde Agung Bharata untuk penyewaan aset Metro Pemprov Bali di wilayah Kabupaten Gianyar dengan dua tersangka, Ida Bagus Nyoman Sukadana (52) dan I Nyoman Pasek Sumertana (51). Selain itu, kasus Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif dengan 24 oknum PNS aktif di lingkungan Pemkab Gianyar sebagai tersangka. (kmb35)





Bali Post/eka  
BPK - Sertijab Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali dari Arman Syifa kepada Dori Santosa di Denpasar, Selasa (6/10) kemarin.

### Sertijab Kepala Perwakilan BPK Bali

## Dana Desa Sudah Terserap 73 Persen

Denpasar (Bali Post) -

Pemerintah dalam hal ini Pemprov Bali masih kesulitan mencairkan dana hibah maupun bansos karena terbentur dengan aturan. Walau sudah ada surat edaran, namun Gubernur Bali tidak mau gegabah untuk mencairkan dana tersebut karena ada aturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Meski demikian,

khusus untuk dana desa, di Bali dari Rp 185 miliar telah terserap 73 persen.

"Penyerapan dana desa di Bali cukup bagus. Dari Rp 185 miliar, 73% di antaranya sudah terserap," kata anggota IV BPK RI Prof. Dr. H. Rizal Djalil, M.M. saat memberi sambutan pada acara serah terima jabatan (sertijab) Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali dari Arman Syifa ke pejabat baru Dori Santosa, S.E., M.M. Dori adalah mantan BKP RI Perwakilan Papua.

Rizal Djalil mengatakan, ada banyak persoalan yang saat ini dihadapi. Pertama masalah penyerapan anggaran, kedua masalah dana desa, ketiga bansos dan terakhir soal alkes. Penyerapan APBN dan APBD merupakan masalah yang kerap dibahas. Dalam konteks penyerapan, belanja modal dan belanja barang dan jasa. Hal tersebut dinilai bersentuhan langsung dengan masyarakat. "Ini sangat dinantikan karena akan memberikan multi efek di daerah," katanya.

Soal dana desa ini, menurutnya, biasa-biasa saja. Hanya, desa jangan diberatkan dengan membuat proposal karena tingkat kemampuan desa berbeda. "Jangan menyulitkan diri dengan aturan-aturan yang tidak perlu," katanya. Menurutnya, dana desa Rp 20,7 triliun dari APBN, yang sudah terserap Rp 16,7 triliun. Khusus untuk di Bali, dana desa Rp 185 miliar dan sudah terserap 73 persen.

Soal bansos, menurut Rizal Djalil, ini adalah program yang sangat bagus, karena diberikan ke masyarakat. "Namun kadang pemerintah membuat aturan berbelit-belit sehingga menyulitkan pemda. Mestinya, langsung disalurkan kepada yang berhak. Ini untuk melindungi masyarakat yang mempunyai risiko sosial," jelasnya. (kmb37)

Edisi : Rabu, 7 Oktober 2015

Hal : 2





## TAPD Godok Anggaran Pilkada



Bali Post/kmb38

**ANGGARAN - TAPD bersama KPUD Buleleng mulai membahas proposal anggaran untuk mendukung pelaksanaan Pilkada Buleleng yang dihelat tahun 2017 mendatang.**

### Singaraja (Bali Post) -

Setelah proposal anggaran untuk pelaksanaan Pilkada Buleleng tahun 2017 secara resmi diajukan kepada Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mulai membahas proposal tersebut. Dari pembahasan awal, TAPD belum memutuskan nilai anggaran pilkada yang akan dimasukkan dalam anggaran induk APBD Buleleng tahun 2016 mendatang. KPUD Buleleng sebelumnya mengajukan proposal kebutuhan anggaran pilkada Rp 46,8 miliar. Demikian terungkap dalam rapat TAPD bersama KPUD Buleleng di lobi kantor Bupati, Selasa (6/10) kemarin.

Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana bersama Wakil Bupati dr. Nyoman Sutjidra, Sp. OG., sempat memberikan pengarahan singkat kepada peserta rapat. Setelah itu, ra-

pat dipimpin Sekkab Buleleng Ir. Dewa Ketut Puspaka, M.P. didampingi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Ida Bagus Suadnyana, S.H., Ketua KPUD Gede Suardana bersama para komisioner KPUD Buleleng.

Usai rapat Sekkab Buleleng Dewa Ketut Puspaka menjelaskan, rapat kali ini merupakan langkah awal untuk mempelajari secara umum kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan pilkada 2017 mendatang. Pembahasan awal ini, TAPD masih mengkaji usulan kebutuhan anggaran yang sudah diajukan oleh KPUD. Selain itu, TAPD juga masih mempelajari regulasi yang mengatur setiap item penganggaran untuk pelaksanaan pilkada mendatang. Setelah rapat awal ini, TAPD kembali menjadwalkan rapat lanjutan sebelum nantinya nilai anggaran pilkada

Edisi : Rabu, 7 Oktober 2015

Hal : 11





Sambungan - - -

ini akan dimasukkan dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS). "Ini baru rapat awal dan kami masih mengkaji usulan sekaligus mempelajari regulasi yang mendasari. Nanti akan ada rapat lagi sampai nantinya usulan dimasukkan dalam KUA dan PPAS untuk selanjutnya dibahas bersama DPRD," tegasnya.

Menurut mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Buleleng ini, selama pembahasan TAPD akan melakukan upaya penghematan kebutuhan anggaran. Namun, penghematan ini sifatnya tidak mutlak dilakukan. Kalau nilai anggarannya diperlukan dan relevan dengan regulasi yang ada, TAPD tidak akan berpanjang waktu dan akan memasukkan kebutuhan anggaran pilkada dalam dokumen APBD induk tahun 2016. "Kami belum berani menyebut

nilai, karena ini masih dibahas. Yang jelas, kalau ada yang bisa dihemat akan kita pelajari bersama, namun kalau kebutuhannya relevan dengan regulasi dan ini sudah menjadi tanggung jawab pemerintah kami akan segera masukkan dalam dokumen APBD 2016," tegasnya.

Sementara itu, Ketua KPUD Buleleng Gede Suardana mengatakan, penyusunan proposal anggaran dilakukan secara proporsional dan mengacu pada standar kebutuhan dan standar biaya masukan (SBM-red) tahun 2016. Di samping itu, penyusunan anggarannya mengacu pada UU nomor 8 tahun 2015, Permendagri nomor 44 jo 51 tahun 2015 dan Peraturan KPU. Dari proposal yang diajukan itu, terdapat komponen pembentuk anggaran seperti jumlah pemilihan, tempat pemungutan suara (TPS), jumlah penyelenggara *ad hoc* dan jumlah pasangan calon (paslon). "KPU mem-

buka ruang untuk melakukan diskusi dan menerima koreksi pembahasan anggaran dengan pemerintah daerah. Sehingga anggaran Pilkada Buleleng 2017 proporsional, efektif, efisien, dan akuntabel," katanya.

Suardana menambahkan, penyusunan anggaran dilakukan sesuai standar kebutuhan pilkada dan peraturan KPU. Komponen pembentuk anggaran itu seperti jumlah TPS sebanyak 1.183 unit, penyelenggara *ad hoc* sebanyak 11.625 dan enam paslon. Di samping itu, biaya honorarium dan lembur membutuhkan anggaran Rp 22,5 miliar. Biaya pengadaan dan penggandaan Rp 24,3 miliar. Dari item kebutuhan itu, total anggaran yang diperlukan Rp 46,8 miliar. "Pembahasan anggaran selanjutnya dilakukan bersama dengan Bawaslu Bali, Kepolisian dan TNI," imbuh pria bertubuh kurus ini. (kmb38)





## Vonis Wayan Candra JPU Juga Ajukan Kasasi



Bali Post/kmb

**Made Pasek**

di tingkat banding.

"Kami (jaksa) sudah mengajukan kasasi, bahkan lebih dulu," tegas Kasi Pidsus Kajari Klungkung Made Pasek ketika diminta konfirmasi, Selasa (6/10) kemarin. Menurutnya, jaksa mengajukan kasasi pada 21 September

**Semarang (Bali Post) -**

Upaya kasasi yang dilakukan mantan Bupati Klungkung I Wayan Candra mendapat perlawanan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Klungkung juga mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Malah, JPU mengajukan kasasi lebih awal ketimbang Candra yang dihukum 15 tahun

lalu. Memori kasasi sudah diserahkan kepada Pengadilan Tipikor pada 30 September.

Ada beberapa alasan yang menyebabkan pihak jaksa mengajukan kasasi. Di antaranya soal pasal yang dijatuhkan hakim saat banding menggunakan pasal 3, sedangkan jaksa memakai pasal 2. Terkait uang pengganti, jaksa menuntut terdakwa Rp 42 miliar, namun di banding hanya dikenakan Rp 1,2 miliar. Hal ini tentu sangat jauh dari tuntutan jaksa.

Pasek juga mengatakan ada aset dari terdakwa yang tidak dirampas, sehingga jaksa mengajukan kasasi ke MA. Aset itu berupa perusahaan milik terdakwa, yakni PT Bahtera Sujud Alam (BSA). Perusahaan ini bergerak di bidang travel dan dicurigai hasil kejahatan terdakwa dengan modus pencucian uang. "Dengan alasan inilah maka kami mengajukan kasasi," katanya.

Sementara itu, ditanya nasib tiga tersangka lainnya, yakni I.B. Susila, Gusti Ayu Wardani, dan Luh Hendrawati yang terlibat kasus dugaan korupsi proyek berbeda, Pasek mengatakan berkas ketiganya masih dalam proses. Untuk tersangka Susila, Gusti Ayu Wardana, berkasnya sudah masuk tahap dua, yakni pri penyidik ke penuntut umum. Sementara tersangka Luh Hendrawati, kasusnya masih dalam pemberkasan.

Tiga tersangka terlibat dalam kasus dugaan korupsi lahan dermaga. Mereka diketahui berpera sebagai makelar tanah. Sebenarnya ada lima makelar tanah yang ditetapkan jaksa sebagai ter-angka, namun Anggara Junisari dan Dewa Ayu Budi Arini, kasusnya telah di-SP3-kan bersama tersangka Wayan Merges yang dinilai menjual tanah negara. (kmb)

Edisi : Rabu, 7 Oktober 2015

Hal : 10